



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	✓	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

MEDIA

radar

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	✓	31

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	✓	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	---	-------------------	-------------------	------	----------	-----------------	---------	----------------------	-----------------

Bupati Sigi Serahkan LKPD ke BPK RI



SERAHKAN LKPD : Bupati Sigi Moh Irwan Lapotta menyerahkan LKPD tahun 2016 ke Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah M Bayu Sobantha, Jumat (31/3).

Bupati Sigi Serahkan LKPD ke BPK RI

PALU - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 Kabupaten Sigi resmi diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulhng), Jumat (31/3).

LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sigi Moh Irwan Lapotta Sos MSI, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulhng Des M Bayu Sobantha MBA di Gedung BPK RI Perwakilan Sulhng, Jalan Moh Yamin. Irwan menggunakan penyediaan LKPD sebagai kontrol sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah wajib bertanggung jawab secara transparan. Harapannya tidak lain adalah, efisien dan efektivitas pelaksanaan keuangan itu sendiri.

"Ini merupakan upaya kami sebagai pemerintah dalam perbaikan manajemen, pengelolaan keuangan. Jika ini baik, maka tujuan

program pembangunan pemerintahan daerah dapat segera terealisasi, dan hal ini sangat mendasar bagi kami," jelas Irwan.

Tidak hanya itu semua itu bertujuan untuk mencapai opini WTP, Irwan berharap opini ini bisa lebih baik dari tahun kemarin dan bisa ke WTP. Maka dari itu Irwan kemarin Pemkab Sigi melakukan sensus barang dan aset, dan ada perubahan yang cukup signifikan dari hasil sensus tersebut.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulhng, Des M Bayu Sobantha MBA, menyampaikan, hal ini telah diamanatkan dalam Undang-undang (UU) No 1 Tahun 2004, dan BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. "Sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, kami akan menestika bagaimana pelaksanaan anggaran di tahun 2016 dan juga akan menestika bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban serta laporan dan kekayaan

daerah yang dikelola masing-masing pemerintahan kabupaten maupun kota," katanya.

Dia menjelaskan, LKPD yang diserahkan kepada BPK ini belum final (un-audited). Maka dari itu, dalam dua bulan ke depan BPK akan kembali setelah pemeriksaan interim pertama dalam 40 hari terakhir. "Untuk pemeriksaan LKPD ini, nantinya akan sampai pada kesimpulan opini yang tentunya diharapkan oleh kabupaten maupun kota yang bersangkutan," jelasnya.

Tidak hanya Kabupaten Sigi baru hadir dalam penyediaan LKPD itu antara Kabupaten di Sulhng lainnya yakni Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Parigi Moutong. Serta ditilikikan juga penyediaan LKPD Provinsi Sulhng yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sulhng, Des H Lengki Djanggala MSI. (ndr)